

PEMIKIRAN POLITIK ISLAM DI INDONESIA: ANTARA SIMBOLISTIK DAN SUBSTANTIVISTIK (Kajian Pra, Masa, dan Pasca Orde Baru)

M. Rahmat Effendi**

Abstraksi

Setelah mencapai kemerdekaan Republik Indonesia (1945), perjuangan bangsa Indonesia melalui: (1) Era Orde Lama (1945-1966), yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Pada era ini pemikiran bangsa Indonesia terbagi menjadi nasionalis sekuler dan nasionalis Islam, dalam hal ini umat Islam memainkan peran yang sangat besar untuk menghancurkan kekuatan Komunis di Indonesia; (2) Era Orde Baru (1966-1998), dipimpin Presiden Soeharto yang berlangsung selama lebih kurang 32 tahun secara terus menerus. Pada era ini pemikiran politik Islam mengalami pasang surut; dan (3) Era Reformasi (1998 hingga sekarang), ini telah mengalami tiga kali suksesi kepemimpinan, yaitu Persiden: BJ. Habibie, KH. Abdurrahman Wahid, dan Megawati Soekarno Putri. Di era ini mulai bermunculan kembali partai politik Islam. Partai Islam yang muncul sekurang-kurangnya meliputi tiga katagori dengan berlatarbelakang Islam. Pertama, Partai yang menginginkan dipakainya Islam sebagai asas dan memperjuangkan nilai-nilai keislaman. Kedua, Partai yang berasaskan Pancasila, tetapi tetap mempertimbangkan konstituante tradisional Islam. Ketiga, Partai yang memiliki hubungan khas dengan kalangan muslim, tetapi tidak membatasi diri pada umat Islam dan kepentingan khususnya.

Kata kunci: Politik Islam, Simbolistik, dan Substantivistik

1 Pendahuluan

Nuansa politik dalam Islam telah berkembang sejak zaman Rasulullah SAW. Oleh karena itu, menurut keyakinan mayoritas Muslim menerapkan model masyarakat Islam ideal era Nabi SAW bukanlah utopia, sebab model itu pernah terbukti dalam sejarah. Jika pada periode Mekah kaum muslimin masih menempati posisi marginal dan senantiasa tertindas, maka pada

** M. Rahmat Effendi, Drs, M.Ag, adalah dosen tetap Fak. Ushuluddin UNISBA

periode Madinah mereka telah mengalami perubahan yang sangat dramatis: umat Islam menguasai pemerintahan dan bahkan merupakan *a self-governing community*. Di Madinah peran Nabi Muhammad SAW selain sebagai **agamawan** beliau juga sebagai **negarawan**.¹ Sejak saat itu oleh pakar politik modern, Islam dipandang sebagai suatu sistem pemerintahan *politik* dan sekaligus *agama*.²

Setelah Rasulullah SAW wafat, paradigma politik Islam terus berkembang. Dien Syamsuddin,³ mengkatagorisasikannya pada tiga paradigma: (1) Agama dan negara tidak bisa dipisahkan (*integrated*);⁴ (2) Agama dan negara berhubungan secara *simbiotik*;⁵ dan (3) Islam tidak mempunyai kaitan apapun dengan sistem pemerintahan (*sekularistik*).⁶

¹ Dewan Editor, *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam-2*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hove, 2002),hal.2

² M. Rahmat Effendi, “Kekuasaan Negara dalam Perspektif Dakwah Islam”, *Mimbar, Jurnal Sosial dan Pembangunan*, (Bandung: Pusat Penerbitan Universitas, LPPM Unisba, September 2003), hal. 261

³ Din Syamsudin, “Usaha Pencarian konsep Negara Dalam Sejarah Pemikiran Islam”, *Jurnal Ilmu dan Kebudayaan Ulumul Qur’an*, (Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat (LSAF) dan ICMI, No.2/IV/1993),hal.5

⁴ Din Syamsuddin menjelaskan, bahwa dalam pemikiran pertama (*integrated*=Islam dan negara bersifat *integrated*) terdapat dua bentuk paradigma, yaitu: (a) Pemikiran *teokratis* dalam perspektif Syi’ah; dan (b) Pemikiran *teo-demokratis* dalam perspektif Maududi.

⁵ Salah seorang tokoh pemikir *simbiosis* yaitu Al-Mawardi (w. 1058), dalam bukunya *al-Ahkam al-Sulthoniyah*, menegaskan bahwa kepemimpinan negara (*imamah*) merupakan instrumen untuk meneruskan misi kenabian guna memelihara agama dan mengatur dunia. Pemeliharaan agama dan pengaturan dunia merupakan dua jenis aktivitas yang berbeda, namun berhubungan secara *simbiotik*. Keduanya merupakan dua dimensi dari misi kenabian. Pemikir-pemikir lain yang dapat digolongkan pada pandangan simbiosis adalah al-Gazali (dalam *Nasihah al-Mulk*), beliau mengutarakan, jika Tuhan telah mengirim nabi-nabi dan memberi mereka wahyu, Maka Dia juga mengirim mereka raja-raja dan memberi mereka “kekuatan Ilahi”. Keduanya antara Nabi dan raja memiliki tujuan yang sama yaitu kemaslahatan kehidupan manusia.

⁶ Salah seorang pemrakarsa paradigma *sekularistik* adalah ‘Ali Abd al-Raziq, ia mengemukakan bahwa Islam tidak mempunyai kaitan apapun dengan sistem pemerintahan *ke-khalifah-an*, termasuk kekhalifahan *al-Khulafa al-Rasyidin* bukan sebuah sistem keagamaan atau keislaman, tapi sebuah sistem duniawi. Isu sentral diantara pokok pandangan Abd al-Raziq antara lain: “Islam tidak menetapkan suatu regim pemerintahan tertentu, tidak pula mendesakkan kepada kaum Muslimin suatu sistem pemerintahan tertentu lewat mana mereka harus diperintah; tapi Islam telah memberikan kita kebebasan mutlak untuk mengorganisasikan negara sesuai dengan kondisi intelektual, sosial dan

Pada bagian lain, Din Samsudin⁷ mengungkapkan bahwa dalam proses pencarian konsep tentang negara, para pemikir politik Islam berhadapan dengan dua tantangan yang saling tarik menarik, yaitu: (1) tantangan *realitas politik* yang harus dijawab; (2) tantangan *idealitas agama* yang harus dipahami untuk menemukan jawabannya. Namun, sepanjang sejarah yang dilalui hingga kini nampaknya pemikiran politik Islam terus berjalan “**secara paralel**” antara *integrated*, *simbiotik*, dan *sekularistik*. Pemikiran-pemikiran tersebut menampilkan perbedaan mendasar pada aktualisasi keyakinan keagamaan (*religious belief*) ke dalam aksi politik (*political action*).

Permasalahannya adalah: Apakah paradigma seperti disebutkan di atas berkembang pula dalam pemikiran politik Islam di Indonesia?

Jika mengamati pandangan para pakar politik Islam di Indonesia, maka paradigma hubungan antara agama dan negara di Indonesia cenderung berkembang di antara pemikiran *formalistik* dan *substantivistik*.⁸ Kelompok *formalisme* keagamaan cenderung melakukan **politisasi agama**, sedangkan kelompok *substantivisme* keagamaan cenderung melaksanakan **substansi agama ke dalam proses politik**.

Pergulatan pemikiran politik Islam di atas nampak terutama setelah berakhirnya pemerintahan Demokrasi Terpimpin (pemerintahan yang dipandang oleh kaum muslimin Indonesia lebih dekat dengan Partai Komunis Indonesia), yaitu pada pemerintahan Orde Baru. Munculnya Orde Baru dianggap sebagai kemenangan umat Islam karena mereka ikut andil dalam pembentukannya. Namun, karena pemerintah Orde Baru lebih berorientasi pada pembangunan ekonomi, maka demi terjaminnya stabilitas sosial rezim ini, pemerintah mengotrol partai politik dengan mencampuri urusan intern partai dan melakukan penyegaran ideologi, puncaknya pada

ekonomi yang kita miliki, dan dengan mempertimbangkan perkembangan sosial dan tuntutan zaman.

⁷ Din Syamsuddin, Upaya.....hal.9

⁸ Sesuai dengan arti kata kedua istilah ini, pendekatan “*formalistik*” cenderung mementingkan bentuk dari pada isi. Pendekatan ini akan menampilkan konsep tentang negara dengan simbolisme keagamaan, seperti tampak pada model negara Islam dan atau partai Islam. Sebaliknya pendekatan “*substantivistik*” cenderung menekankan isi dari pada bentuk. Dalam konteks konsep negara, mereka memusatkan perhatian kepada bagaimana mengisinya dengan etika dan moralitas agama.

pemberlakuan **asas tunggal** (Pancasila) terhadap semua partai politik dan organisasi kemasyarakatan.

Berkaitan dengan paparan di muka, maka pembahasan pemikiran politik Islam di Indonesia dalam tulisan ini diarahkan pada pemikiran politik Islam *pra*, *masa*, dan *pasca* Orde Baru.

Islam Dan Umat Islam Pra Orde Baru

Pembahasan tentang Islam dan umat Islam *pra Orde Baru* terkait erat dengan *gerakan tajdid* yang muncul pada akhir abad ke 19 dan awal abad ke 20-an yang dikenal sebagai gerakan pemikiran Islam modern di Indonesia. Salah satu ciri khasnya ialah berdirinya organisasi-organisasi Islam, seperti *Syarekat Dagang Islam (SDI) berdiri th. 1909; Syarekat Islam (SI) berdiri th. 1911; Muhammadiyah berdiri th. 1912; Persatuan Islam (Persis) berdiri th. 1923; Nahdlatul 'Ulama (NU) berdiri th. 1926*, semua organisasi ini di dirikan di Jawa, sedangkan *Tawalib yang berdiri th. 1918* di Sumatera. Proyek garapannya diarahkan pada perjuangan: *Pertama*, Pembentukan, dan penyempurnaan *Tauhid*; *Kedua*, Mencapai *Kemerdekaan*.⁹

Setelah mencapai kemerdekaan Republik Indonesia (1945), perjuangan bangsa Indonesia melalui *Era Orde Lama* (1945-1966), era ini dipimpin oleh Presiden Soekarno. Pada era ini pemikiran bangsa Indonesia terbagi menjadi *nasionalis sekuler* dan *nasionalis Islam*. Jika kita mencermati perjuangan umat Islam di era ini, tidak seorang pun yang menafikan bahwa umat Islam memainkan peran yang sangat besar dalam menghancurkan kekuatan **Komunis** di Indonesia

Di era Orde Lama, ide **Negara Islam** (gagasan Negara Islam sebagai gejala awal abad ke-20-an) harus berhadapan dengan ide **Negara Nasional** berdasarkan Pancasila. Akhirnya melalui Dekrit 5 Juli 1959, ide Negara Islam “*dikalahkan*” sementara dasar Pancasila “*dimenangkan*”. Dalam kesempatan ini *K.H. Ahmad Siddiq (Alm.)* menfatwakan, bahwa Negara Nasional Indonesia yang berdasarkan Pancasila sudah merupakan bentuk final bagi umat Islam. Sebuah fatwa politik yang tampaknya ingin

⁹ H.A.R Gibb, *Modern Trends in Islam*, (1932), hal. 43-84

menghapus trauma masa lalu antara umat Islam dengan pihak penguasa. Perjuangan selanjutnya, menjadikan Negara Pancasila itu sebagai kendaraan untuk mewujudkan suatu tata sosio-politik yang adil, demokratis, dan egaliter di atas landasan *moral-transendental*.

Pemikiran Politik Islam Masa Orde Baru

Secara *dialektis*, Demokrasi Pancasila adalah sebuah *sintesis* dari Demokrasi Liberal tahun 1950-an dan Demokrasi Terpimpin (1959-1965) yang minus demokrasi itu. Namun, karena disintegrasi nasional dan instabilitas politik yang terjadi sepanjang 20 tahun pertama pasca kemerdekaan merupakan trauma politik yang terus menerus menghantui rezim Orde Baru, maka rezim Orde Baru sangat menaruh perhatian terhadapnya. Sedemikian besarnya perhatian ini sehingga Orde Baru tampak sangat *represif* atau *quasi-represif* dalam menangani isu-isu di sekitar integrasi nasional dan stabilitas politik. Sehingga pemerintah Orde Baru dalam mengelola konflik politiknya melakukan *depolitisasi* dan puncaknya memberlakukan politik "*Asas Tunggal*".

Karena prioritas difokuskan kepada pembangunan ekonomi yang harus ditopang oleh stabilitas politik dan keamanan nasional, maka pembangunan demokrasi mengalami kelambanan. Dalam kaitan ini, **ide politik Islam** selama periode Orde Baru harus disampaikan dengan sangat hati-hati. Trauma politik masa lampau dengan pihak ABRI berangsur-angsur hilang, tetapi ide tentang Negara Islam sudah gugur dengan sendirinya dengan ditetapkannya Pancasila sebagai satu-satunya asas orpol dan ormas.

Ketika sejumlah tokoh Islam (*terutama tokoh Masyumi*) dibebaskan dari penjara Soekarno pada tahun 1966, muncul suatu kerinduan dan optimisme terhadap partai politik Islam yang besar dan kuat itu. Mantan ketua *Masyumi* ketika dibubarkan pada tahun 1960, *Prawoto Mangkusasmito*, sangat aktif ingin mewujudkan rehabilitasi *Masyumi* sebagai Partai politik. Akan tetapi, usaha tersebut mendapat tantangan yang sangat keras dari pelbagai pihak, terutama dari Angkatan Darat, kalangan Kristen/Katolik, dan para tokoh Partai Nasional Indonesia. Bahkan ketika tuntutan umat Islam semakin menguat, pemerintah justru mengambil kebijakan untuk memperkecil ruang gerak politik mereka. Militer kemudian semakin tegas mengklaim kedudukannya sebagai pembela utama UUD 1945 dan Pancasila. Militer juga tidak segan-segan melawan kekuatan yang dipandang hendak menggantikan UUD 1945 dan Pancasila. Keberatan

militer terhadap rehabilitasi Masyumi dilatarbelakangi traumanya akan simpati Masyumi kepada pemberontakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) dan banyak tokoh-tokohnya yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Secara formal alasan penolakan terhadap rehabilitasi *Masyumi* adalah persoalan “*hukum dan psikologis*”. Padahal yang sebenarnya akibat dari kekhawatiran dihadapkannya kembali *Masyumi*, kekuatan politik Islam akan dengan mudah dimobilisasikan sehingga menjadi satu kekuatan politik yang sangat besar.

Pada masa transisi menuju Orde Baru, hubungan yang mulai membaik antara Angkatan Darat dengan umat Islam sedikit demi sedikit semakin melemah, bahkan dalam perjalanan berikutnya timbul saling mencurigai dan tidak jarang timbulnya konflik. Keberatan pemerintah untuk merehabilitasi Masyumi mendorong sebagian umat Islam untuk mencari jalan lain untuk menghidupkan partai Islam. Pada tanggal 7 April 1967 Badan Koordinasi Amal Muslim (BKAM) membentuk Kelompok Tujuh untuk merancang pembentukan partai baru menggantikan Masyumi.¹⁰ Maka pada tanggal 5 Februari 1968 pemerintah menyetujui berdirinya Partai Muslimin Indonesia (PARMUSI) sebagai gabungan partai Islam, sebagaimana diusulkan BKAM. Namun pemerintah mensyaratkan Parmusi bukanlah Masyumi (mantan pemimpin Masyumi tidak boleh memimpin Parmusi).

Persetujuan berdirinya Parmusi belum menjamin terakomodasinya aspirasi politik Islam. Buktinya pemerintah selalu mencampuri Parmusi dalam hal kepemimpinan. Ketika ***Partai Muslimin Indonesia (PARMUSI)*** untuk pertama kalinya hendak mengadakan Mukhtar pada tanggal 4 – 7 November 1968 di Malang Jawa Timur, peserta Mukhtar sepakat memilih *Mr. Muhammad Rum* sebagai *Ketua Umum Partai* yang baru itu. Menurut Muktamirin, walaupun Roem salah seorang anggota bekas pimpinan Partai Masyumi, ia bersih dari “dosa” politik Masyumi (yaitu simpati kepada pemberontakan PRRI), bahkan tidak jarang Muhammad Roem bersebrangan dengan tokoh karismatik Masyumi M. Natsir. Dengan latar belakang demikian, Parmusi optimis bahwa pemerintah tidak akan keberatan dengan naiknya Roem sebagai Ketua Umum Parmusi. Akan tetapi pemerintah dan *Angkatan Darat* berkebaratan terhadap *Mr. Muhammad Rum* karena beliau

¹⁰ Allan Samson, “Islam in Indonesian Politics,” *Asian Survey*, vol. VII, no. 12 Desember 1968. Menurutnya BKAM yang beranggotakan 16 organisasi Islam pada awalnya dibentuk untuk memperjuangkan rehabilitasi Masyumi.

merupakan tokoh *Masyumi* yang masih sangat berpengaruh. Hal ini diperlihatkan dalam kebijakan Presiden yang meminta Jendral Alamsyah Ratuprawiranegara sebagai Sekretaris Negara mengirim telegram ke Malang untuk menginformasikan bahwa pemerintah tidak dapat menerima *Muhammad Rum*. Sebagai jalan keluar yang terbaik pada waktu itu kongres memilih duet antara *Djarnawi Hadikusumo* sebagai *Ketua* dan *Lukman Harun* sebagai *Sekretaris Jendral Partai Muslimin Indonesia*. Keduanya berasal dari *Muhammadiyah* sebagai komponen terbesar dari partai tersebut.

Dalam waktu yang tidak lama, kepemimpinan *Djarnawi Hadikusumo* dan *Lukman Harun* tidak dapat bertahan dengan baik. Pihak pemerintah tampaknya kesulitan untuk menerima kedua tokoh tersebut karena dianggap keras sekali, dan dipandang tidak *akomodatif*. Atas rekayasa dari pihak *opsus* yang dipimpin oleh Ali Murtopo, kepemimpinan Partai Muslimin Indonesia diambil alih oleh *Jaelani Naro*¹¹ dan *Imran Kadir* yang menimbulkan konflik internal dalam tubuh partai. Akibatnya, pemerintah menunjuk *MHS. Mintareja* salah seorang anggota kabinet Soeharto sebagai *Ketua Partai Muslimin* menggantikan *Djarnawi Hadikusumo* (20 November 1970). Sejak saat itu ketegangan antara pemerintah dan Islam mulai muncul di permukaan karena para aktivis dan pemimpin partai agama mulai menunjukkan oposisi yang jelas.

Cendekiawan Muslim yang muncul pada 1970-an telah menerima dengan mantap ide Negara Nasional berdasarkan Pancasila, baik secara teoritis maupun praktek. Menjelang diadakannya Pemilihan Umum (pemilu) pertama masa pemerintahan Orde Baru, *Nurcholis Majid* melontarkan gagasan yang kemudian memicu kontroversi di kalangan umat Islam. Sekalipun gagasan itu tidak secara langsung ditawarkan dalam kaitannya dengan pelaksanaan pemilu, namun karena waktu itu dekat dengan pelaksanaan Pemilu, menjadikan lontaran *Nurcholish Majid* sangat penting dari dilihat sudut politik. Dalam ceramah di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta, pada 21 Oktober 1972, *Nurcholis* menggarisbawahi perlunya pembaharuan pemikiran dalam Islam. Anjurannya terpusat pada dua gagasan utama, yaitu: (1) Gagasan sekularisasi; dan (2) Penolakan terhadap

¹¹ Di dalam Ensiklopedi Tematis Dunia Islam, dinyatakan bahwa *Jaelani Naro* melakukan “kudeta” terhadap kepemimpinan *Djarnawi* dan *Lukman Harun*. *Naro* adalah salah seorang *Ketua Parmusi* yang dikenal memiliki hubungan khusus dengan *Ali Murtopo* salah seorang arsitek politik Orde Baru.

dijadikannya Islam sebagai ideologi politik dengan pernyataannya yang terkenal **ISLAM “YES”, PARTAI ISLAM “NO”**.

Ketika menghadapi pemilihan umum tahun 1971, konflik antara kebijakan partai yang membawakan aspirasi Islam dengan pihak pemerintah berkelanjutan. Konflik ini disebabkan oleh: **Pertama**, berkaitan dengan kebijakan Menteri Dalam Negeri No.12 yang dipandang sebagai suatu usaha untuk melakukan **pengebirian** terhadap partai-partai politik di Indonesia. **Kedua**, Lembaga Pemilihan Umum yang diketuai oleh Mendagri memangkas dalam jumlah yang sangat besar calon-calon yang diajukan oleh **Partai Muslimin Indonesia** yang sangat berpengaruh. Sebab kalau mereka dibiarkan aktif dalam proses penyelenggaraan Pemilu tentu saja akan sangat melemahkan partai pemerintah, “**Golkar**”.¹²

Situasi yang terkait dengan karakteristik pemerintahan Orde baru yang dipandang *authoritarian* dalam membentuk format politik baru terutama dalam masa-masa transisi dari Orde Lama ke Orde Baru, pemerintah mengambil langkah *depolitisasi* yang dilakukan secara *sistematik* lewat sejumlah kebijakan termasuk didalamnya adalah: (1) monoloyalitas; (2) kebijakan massa mengambang (*floating mass*); (3) emaskulasi dari partai-partai politik (kasus pengangkatan Mintareja dan Naro bagi Ketua PARMUSI); dan (4) pemilihan umum yang sama sekali tidak *kompetitif*. Kebijakan tersebut menjadikan Islam sebagai target sasaran yang besar sekali, dan memancing reaksi umat Islam.

Partai Politik Islam

Puncak kegagalan politik Islam untuk kembali berkhiprah adalah hasil pemilu pertama Orde Baru pada 1971, yang membawa kemenangan mutlak kepada **Golkar**, ia mengantongi: 62,80 % suara. Partai Islam memperoleh jatah suara yang kecil. Hanya **NU** yang relatif tidak diintervensi pemerintah memperoleh jumlah suara relatif besar yaitu: 18,67 %, sedikit lebih baik dibandingkan dengan perolehan suara NU pada 1955 (18,4 %). **Parmusi**, yang digambarkan sebagai pengganti **Masumi**, benar-benar hancur dan hanya memperoleh 5,36 %, jauh dari perolehan Masyumi pada Pemilu 1955 (20,9 %). Partai Islam lain, **Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII)** dan

¹² Afan Gaffar, *Islam dan Politik Dalam Era Orde Baru: Mencari Bentuk Artikulasi Yang Tepat*, (Jakarta: Ulumul Qur'an, 1993), hal.19-20

Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti), masing-masing hanya memperoleh 2,39 % dan 0,70 % suara.¹³

Kenyataan pahit Pemilu 1971 semakin mengentalkan rasa putus asa, bahkan kemarahan umat Islam. Kepedihan itu mengingatkan kecurangan dan pemaksaan pemerintah dalam proses Pemilu tersebut. Melalui kekuatan Golkar, pemerintah memanfaatkan birokrasi sebagai mesin suara. Di samping itu, dukungan militer yang kuat terhadap Golkar menjamin kemenangan mutlak organisasi sosial-politik tersebut.

Sesuai dengan perolehan suara pada Pemilu 1971, Golkar mendapat 392 kursi, ABRI 230 kursi, utusan daerah dan golongan 130 kursi, partai Islam (NU, Parmusi, PSII, dan Perti) 126 kursi, dan partai lain (PNI, Parkindo, Parkat, IPKI, dan Partai Murba) memperoleh 42 kursi. Dengan hanya memperoleh jumlah wakil yang kecil, ruang gerak politik Islam sangat terbatas. Sebaliknya, kedudukan pemerintah relatif aman untuk menggolkan agenda politiknya di parlemen. Kemenangan mutlak Golkar juga memberikan legitimasi bagi pemerintah dan militer untuk melakukan kontrol terhadap kehidupan politis.

Belum sembuh luka akibat perolehan suara yang tidak memuaskan pada Pemilu 1971, umat Islam dihadapkan kepada program pengembangan sistem politik hegemonis. Pada bulan Januari 1973 pemerintah memutuskan untuk melakukan ***restrukturalisasi sistem kepartaian***. Dalam struktur politik yang baru ini, seluruh partai kecuali Golkar, harus bergabung ke dalam dua partai politik. Keempat partai Islam ***NU, Parmusi, PSII, dan Perti*** digabung kedalam ***Partai Persatuan Pembangunan (PPP)***, sedangkan lima partai lainnya yang berlatar belakang nasionalis (***PNI, IPKI, dan Murba***), Kristen Protestan (***Parkindo***) dan Katolik (***Parkat***), digabung ke dalam ***Partai Demokrasi Indonesia (PDI)***.

Sebagai akibat dari penggabungan yang dipaksakan, konflik internal di dalam kedua partai baru, ***PPP*** dan ***PDI***, tak terhindarkan. Walaupun ***PPP*** lebih diuntungkan oleh karakter keislaman dan karena elite partai adalah juga elite organisasi keagamaan, hal itu tidak menjamin kesatuan yang utuh. Konflik di tubuh ***PDI*** tampaknya lebih kompleks jika dibandingkan dengan konflik di ***PPP***. Selain itu, meskipun pemerintah telah merestrukturisasi sistem kepartaian, intervensinya dalam dua partai tidak menyusut. Setiap ada

¹³ Dewan Editor, *Ensiklopedi Tematis*.....(jld 6), hal. 359

konflik internal partai, pemerintah turut campur dengan alasan sebagai pembina politik.

Kekhawatiran umat Islam, adalah akan digunakannya legitimasi kemenangan mutlak Pemilu 1971 oleh pemerintah untuk mengeluarkan berbagai kebijakan strategis yang dianggap menyusutkan mereka terwujud. Karena Golkar yang ditambah wakil ABRI dan Utusan Golongan serta Utusan Daerah memperoleh mayoritas anggota parlemen. Usulan pemerintah seperti mensejajarkan aliran kebatinan dengan agama yang diakui di Indonesia dengan mudah dapat disetujui lembaga tersebut. Contoh lainnya adalah RUU Perkawinan, yang dianggap umat Islam melecehkan agama karena beberapa pasalnya bertentangan dengan ajaran Islam. Menurut para ulama seperti Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau Hamka, ketua umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada saat itu, ada beberapa pasal dalam RUU yang bertentangan dengan ajaran Islam, utamanya tentang sistem parental, perkawinan antar agama, pertunangan, tata cara gugatan perceraian, dan pengangkatan anak (adopsi). Karena muncul demonstrasi besar di luar MPR-DPR, bahkan pendudukan gedung tersebut oleh massa pemuda Islam, akhirnya pasal yang ditentang oleh umat Islam itu dicoret dari RUU Perkawinan.

Walaupun demonstrasi penolakan RUU Perkawinan mampu memaksa pemerintah untuk memperhatikan aspirasi umat Islam, namun keinginan pemerintah menggolkan agenda politik yang tidak sesuai dengan cita-cita umat Islam tetap saja dilakukan. Hal ini terlihat dari usul pemerintah untuk mewajibkan Pancasila sebagai satu-satunya asas ideologi bagi semua organisasi politik dan sosial di Indonesia. Bidikan utama kebijakan itu adalah **PPP**, yang menggunakan Islam sebagai asas partai. Gambar **PPP** pun (ka'bah) menunjukkan ciri khas Islam. Walaupun Partai Kristen, Katolik, dan Partai lainnya juga menggunakan ideologi bukan Pancasila, namun asas Islam lah yang dirasakan oleh pemerintah mempunyai potensi untuk menghimpun kekuatan perlawanan. Gagasan tentang asas tunggal ini tertulis dalam pidato kenegaraan Presiden di depan Sidang Pleno DPR tanggal 16 Agustus 1982.

Perumusan Kembali Politik Islam

Ketika peminggiran politik Islam mencapai puncaknya dengan diberlakukannya asas tunggal yang berarti juga melemahnya gerakan politik

Islam yang bersifat **formalistis** dan **legalistis**, mendorong sebagian dari mereka untuk merumuskan kembali makna dan strategi politik Islam lebih jauh. Dengan dipersempitnya ruang gerak bagi politik Islam dalam **bentuk formal**, dijadikan peluang untuk memasuki wilayah politik melalui jalan lain yang dipandang masih sangat terbuka. Mereka menganggap perlu mengakomodasi gagasan pemerintah untuk mengikis kecurigaan antara Islam dan negara.

Realitas politik Islam yang dipandang gagal memotivasi umat Islam, terutama kalangan cendekiawan mudanya yakni mencari rumusan baru politik agar dapat berperan dalam negara. Salah satunya adalah melakukan reorientasi terhadap makna politik Islam yang selama itu dielaborasi dalam corak **legalistis dan formalistis**. orientasi politik baru tersebut lebih mengarah kepada **politik substantif dan integratif**. artinya, pendekatan baru mengutamakan kandungan nilai islam sebagai sumber inspirasi bagi kegiatan politis serta sikap saling menerima dan menyesuaikan antara umat islam dan negara.

Pada periode 1982 - 1985 terjadi perubahan fundamental, mengenai hubungan yang baik antara Islam dan pemerintah orde baru mulai terwujud walaupun belum sampai pada tarap yang ideal. sekalipun hubungan baik ini tidak serta merta dinisbatkan kepada keberhasilan merumuskan orientasi baru politik Islam, namun ada konteks sosial yang ikut mendukungnya, yaitu perbaikan ekonomi, pendidikan, dan mobilitas sosial yang tinggi dari umat dan saling mendukung.

Periode terakhir dekade 1980-an pemerintah orde baru secara perlahan-lahan mengambil kebijakan yang akomodatif terhadap Islam. indikator-indikatornya dapat dilihat sebagai berikut:

1. Sejak Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (sekarang Diknas) dipercayakan kepada menteri *Fuad Hasan*, sejumlah kebijakan yang selama itu dianggap sangat merugikan Islam mulai ditinggalkan. Misalnya dihapuskannya larangan berbusana Muslimah (*yang pernah diberlakukan semasa Menteri Daud Yusuf*).
2. Ketika rancangan *Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional* dibicarakan di DPR, sejumlah pemuka agama Islam mengingatkan bahwa

¹⁴ Tim, Jamhari, *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam: Dinamika Masa Kini (Islam Di Indonesia)*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru VanHoeve, 2002), hal.354.

RUU tersebut tidak memberikan tempat yang sebenarnya bagi Pendidikan Agama. Sejumlah organisasi massa Islam berhasil melakukan diskusi dan lobbying yang serius sehingga ketika RUU tersebut ditetapkan menjadi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 1989 beberapa pasal yang menyangkut peranan pendidikan Agama dapat dimaksukkan. Bahkan **PPP** (Partai Persatuan Pembangunan) berhasil melakukan amandemen di dalam penjelasannya bahwa “*antara pengajar dan anak didik harus memiliki agama yang sama*”.

3. Pemerintah dengan sangat cepat *membreidel Mingguan Monitor* yang memuat berita yang dipandang menghina Islam dan Umat Islam.
4. Memberlakukan *RUU Peradilan Agama Islam* yang cukup mendapat reaksi dari kalangan non-Islam.
5. *Fenomena kelahiran Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI)* yang memperlihatkan kecenderungan ke arah akomodatif.
6. Bantuan pembangunan sarana peribadatan melalui Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila
7. Diangkatnya sejumlah intelektual muslim menjadi anggota MPR yang mewakili golongan.

Salah satu sumber lain yang penting dari perubahan pada masa Orde Baru adalah semakin banyaknya dari kelompok Muslim yang terpelajar. Di satu sisi, dari mereka ini tumbuh persepsi baru tentang hubungan Islam dan negara-bangsa, yang tidak lagi berpegang pada pandangan lama, **Islam sebagai ideologi negara**. Dan di sisi lain mereka semakin kuat, tidak tetap berada di wilayah pinggiran. Dari situ terjadi akomodasi politik antara pemerintah dan kelompok Muslim, antara kedua belah pihak saling membutuhkan.

Nuansa akomodatif tersebut dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh umat Islam, sehingga kecuali memunculkan pemimpin-pemimpin umat juga sejumlah generasi muda Muslim memperoleh kenikmatan untuk mengenyam pendidikan tinggi baik di dalam maupun di luar negeri pada perguruan tinggi yang sangat menonjol. Misalnya: *Amin Rais, Ahmad Syafi'i Ma'arif, Kuntowijoyo, Yahya Muhaimin, Ahmad Watik Pratignya, Umar Anggoro, Jeni, Jamaluddin Ancok, Sofiyon Effendi*.

Implikasi dari kepemimpinan di atas, adalah terjadinya pergeseran

fundamental yang menyangkut persepsi tentang tujuan perpolitikan Islam dan modus dalam berpolitik. Sedangkan yang menyangkut tujuan perpolitikan Islam dapat dikatakan bahwa apa yang hendak diperjuangkan tidak lagi seperti generasi kepemimpinan pasca kemerdekaan yang menghendaki terwujudnya Islam sebagai dasar negara, akan tetapi bagaimana Islam memperoleh representasi yang wajar dan proporsional sesuai dengan besarnya potensi umat Islam. Artinya, bagaimana Islam supaya selalu diperhitungkan dalam perpolitikan nasional dan bagaimana Islam mempunyai akses yang besar dalam pengambilan keputusan/kebijakan. Dengan demikian nilai-nilai Islam akan mewarnai kehidupan berbangsa dan bernegara di tanah air.

Berkaitan dengan itu, *Afan Gaffar* mengusulkan untuk mempertimbangkan bagaimana penampilan yang *low profile*, menjelma dalam artikulasi politik. Sebab penampilan demikian merupakan alternatif yang sangat efisien dan efektif. Dengan demikian, komunikasi yang intensif baik yang dilakukan secara internal dalam arti antar sesama organisasi massa Islam, maupun secara eksternal terutama dengan kalangan Angkatan Bersenjata. Posisi ABRI sangat strategis di antara kekuatan-kekuatan politik yang ada, dan karena itu ia harus selalu dipertimbangkan. Sebaliknya, salah pengertian dengan ABRI akan menimbulkan masalah yang berkepanjangan seperti pengalaman-pengalaman masa lampau.

Namun demikian, sekalipun politik Islam Orde Baru sudah mengalami perubahan yang sangat fundamental, akan tetapi *bagaimana mencari bentuk artikulasi kepentingan Islam yang tepat dalam rangka meningkatkan tujuan perpolitikan Islam*, masih tetap menjadi pekerjaan rumah umat Islam.

Paparan di atas, menggambarkan bahwa perjalanan Islam di Indonesia pada masa Orde Baru mengalami pasang surut. Awal berdirinya Orde Baru, tumbuh semangat baru umat Islam untuk kembali menghidupkan gagasan politik mereka. Namun optimisme tersebut terbukti surut setelah pemerintah yang didukung militer tidak memberikan ruang gerak. Walaupun ada peluang yang diberikan pemerintah untuk politik Islam, namun kontrol dan intervensi pemerintah yang kuat menjadikan kesempatan politik tidak lebih dari sekedar “**aksesoris politik**”. Berlatarbelakang itu, lalu muncul gagasan pembaharuan pemikiran Islam yang dipelopori cendekiawan muda tahun 1970-an.

Berbeda dengan pemikiran yang berkembang pada tahun 1950-an dan 1960-an yang lebih menekankan pada perjuangan formal politik Islam,

pemikiran yang berkembang era 1970-an lebih menitik beratkan pada substansi Islam. Gagasan itu diwujudkan dengan mencoba menghubungkan substansi ajaran Islam dengan isu kontemporer sosial seperti modernisasi, sekularisasi, pluralisme, isu demokrasi, masyarakat madani, hak asasi manusia, dan gender.

Pasca Orde Baru

Naiknya Abdurrahman Wahid (Gus Dur)¹⁵ memegang kekuasaan tertinggi di Indonesia (Presiden) memberikan indikasi yang cukup jelas betapa Islam telah menjadi “pusat” dari wacana ke-Indonesiaan. Di sisi lain, tampilnya Amin Rais sebagai Ketua MPR dan Akbar Tanjung sebagai ketua DPR RI mencerminkan peran umat Islam yang menonjol. Naiknya ketiga tokoh ini mencerminkan keberhasilan pendidikan Islam, baik tradisional maupun modernis.

Setelah Presiden Suharto menyatakan berhenti dari jabatan sebagai Presiden pada tanggal 21 Mei 1998, dan pemerintahan baru di bawah kepemimpinan B.J. Habibie menyatakan bahwa pemilu akan dilaksanakan pada tahun 1999, beberapa partai Islam didirikan oleh kaum muslimin. Berdirinya Partai Islam yang banyak menurut Jamhari, paling tidak ada tiga tipe partai berlatarbelakang Islam yang berdiri.¹⁶

Pertama, Partai yang menginginkan dipakainya Islam sebagai asas dan memperjuangkan nilai-nilai keislaman. Partai dalam kelompok ini adalah: **Partai Keadilan (PK)**; **Partai Kebangkitan Umat (PKU)**, **Partai Nahdatul Ummah (PNU)**, **Partai Indonesia Baru (PIB)**; **Partai Persatuan Pembangunan (PPP)**, dan **Partai Bulan Bintang (PBB)**.

Kedua, Partai yang berasaskan Pancasila, tetapi tetap mempertimbangkan konstituante tradisional Islam. Dalam katagori ini adalah: **Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)**

¹⁵ Gus Dur berpendapat bahwa seharusnya agama jangan dihadapkan dengan negara. Karena realitas sosial budaya Indonesia menunjukkan keberagaman yang kompleks, maka tuntutan umat Islam untuk menjadikan Islam sebagai satu-satunya penentu warna akan mengalami kesulitan. Ketika Gus Dur memimpin NU, ia menggas untuk mengembalikan jati diri NU ke “**Khitah 1926**” yakni sebagai gerakan sosial keagamaan yang meninggalkan politik praktis.

¹⁶ Jamhari, dalam Ensiklopedi Tematishal. 374.

Ketiga, Partai yang memiliki hubungan khas dengan kalangan muslim, tetapi tidak membatasi diri pada umat Islam dan kepentingan khususnya. Partai dalam katagori ketiga ini adalah: **Partai Amanat Nasional (PAN)** dan **Partai Daulah Ummah (PDU)**.

Keinginan untuk menjadikan Islam sebagai asas negara agaknya tidak lagi populer. Bahkan tidak ada lagi partai Islam yang mencita-citakan untuk mendirikan negara Islam di Indonesia.

Pendirian Partai Islam menimbulkan pro dan kontra. Sebagian umat Islam menyambut antusias berdirinya partai Islam sebagai sarana menyalurkan aspirasi politiknya. Sebagian yang lainnya menyuarakan ketidaksetujuannya karena pengalaman pada tahun 1950-an dan 1960-an menunjukkan bahwa partai politik hanya menjadikan umat Islam terkotak-kotak.

Berdirinya partai Islam menurut kalangan yang setuju, jika dilihat dari proses demokratisasi, keberadaan partai Islam sesungguhnya mencerminkan kesediaan umat Islam untuk masuk ke dalam wacana demokrasi. Jadi, partai Islam sesungguhnya merupakan wujud partisipasi umat dan pengakuannya terhadap demokratisasi di Indonesia.

Kesimpulan

Pemikiran di atas, memberikan corak Islam di Indonesia beberapa dekade terakhir, sejak Orde Baru hingga sekarang, tampak berubah-ubah. Jika indikasi politik yang digunakan, maka proses pergeseran (politis) dalam hubungan antara Islam dan negara dapat diamati dengan jelas. Periode ini dimulai dengan hubungan yang baik antara umat Islam dan ABRI (TNI dan Polri) sebagai penopang utama kekuatan Orde Baru hingga kemudian posisi politik umat dipinggirkan. “Mereka telah memperlakukan kita (umat Islam) seperti kucing kurap,” begitu komentar M. Natsir mengenai cara pemerintah Orde Baru menghalangi bangkitnya peran politik Islam. Namun, gabungan keterpaksaan mengikuti alur politik yang diterapkan Orde Baru membatasi jumlah dan peranan partai politik dan mengubah ideologi politik dan reaksi intelektual yang memadai dari kaum muslim sendiri telah mengubah hubungan umat Islam dengan negara. Hubungan yang pada awalnya antagonis kemudian berubah menjadi akomodatif, untuk kemudian, meminjam istilah Bahtiar Effendy, “berkembang ke dalam hubungan yang *integratif* antara Islam dan negara.”

Namun dalam hal *paradigma simbolis* dan *paradigma substansialis* dalam pemikiran politik Islam di Indonesia yang bersifat paralel hingga kini masih terus berlanjut. Oleh karena itu, *bagaimana mencari bentuk artikulasi kepentingan Islam yang tepat dalam rangka meningkatkan tujuan perpolitikan Islam masih tetap menjadi PR Umat Islam*. Dalam hal ini bagaimana representasi Islam secara wajar dan proporsional sesuai dengan potensi Islam sehingga tidak menimbulkan reaksi yang negatif baik dari kalangan internal Islam sendiri maupun yang berasal dari kalangan non-Islam, yang pada akhirnya dapat merugikan kepentingan politik Islam itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Gaffar, Afan. 1993. "Islam dan politik Dalam Era Orde Baru: Mencari Bentuk Artikulasi Yang Tepat". Jakarta. *Jurnal Ilmiah. Ulumul Qur'an*, NO. 2, Vol. IV.
- Syafi'i Ma'arif, Ahmad. 1995. "Muhammadiyah dan hig politics". Jakarta, *Jurnal Ilmiah Ulumul Qur'an*.No. 2 Vol . VI.
- Dewan Editor. 2002. *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam, 2 dan 6*. Jakarta : PT Ikhtiar Baru VanHoeve.
- Saefullah Fatah, Eep. 1994. "Manajemen Konflik Politik dan Demokratisasi Orde Baru". Jakarta. *Jurnal Ilmiah Ulumul Qur'an* : No. 5 dan 6, VolIV.
- , 1994 "Unjuk Rasa, Gerakan Massa dan Demokratisasi: Potret Pergeseran Politik Orde Baru", *Prisma*, NO. 4 dan No. 8 / XXIII/ April.
- Gibb, HAR, 1945: 36. *Modern Trends in Islam*, , dalam *Mukti Ali*: 1971. *Alam Pikiran Modern di Indonesia*, Yayasan Nida, Yogyakarta.
- Amien Rais, M. 1998. *Membangun Politik Adiluhung: Membumikan Tauhid Sosial Menegakkan Amar Ma,ruf Nahi Munkar*. Bandung : Zaman Wacana Mulia.
- U. Tanthowi, Pramono. "Muhammadiyah dan N.U. dalam Kompetisi Makna "Civil society", Jakarta, *Kompas*. Juli:2001.
- William Liddle, R. 1992. *Pemilu-Pemilu Orde Bade Baru: Pasang Surut Kekuasaan Politik: Terj.* Jakarta. Grafiti,
- Soeharto. 1985. *Amanat Kenegaraan I 1967-1971*. Jakarta. Inti Idayu Pers
- Hasyim, Umar. 1979. *Toleransi dan Kemerdekaan Beragama Dalam Islam Sebagai Dasar Menuju Dialog dan Kerukunan Agama*. Surabaya Bina Ilmu.